PENGARUH KOMPETENSI AUDITOR TERHADAP PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
(Studi Pada Pemerintah Kota Bandung)

PEMBIMBING:
Dr.Ely Suhayati, SE.,M.Si.,Ak.,CA.

OLEH:
RIZKI SEPTIDIANY

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

ABSTRACT

Phenomena that occurs on the quality of financial statements in government of Bandung has not received the best value from Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), internal auditing needs to monitor the return follow-up recommendations given and need to increase the competence of internal auditors that audit goes over the maximum. The purpose of this study is to collect and to obtain information about the influence of competence of auditors to internal auditing its implication to quality of financial statements.

The method used in this research is descriptive method of verification. The unit of analysis in this study are all audit team Bandung City Government Inspectorate on IRBAN Region I, II, III & IV, amounting to 21 people. Using the validity and reliability testing as a measure of research. Statistical Test Path analysis was performed using IBM SPSS Statistics software Version 20.0.

The results of this study indicate that the competence of auditors positive significant effect on the Internal Audit with great influence and internal audit 53,3.% positive significant effect on the quality of the financial statements with the influence of 72,4%.

.

Keywords: Competence of Auditors. Internal Auditing, Quality Of Financial Statements

I. PENDAHULUAN

Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan (Mardiasmo,2002:59). Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu wujud bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan operasional pemerintah daerah, hal tersebut menjadi tolak ukur kinerja untuk dapat dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran (Dadang Suwanda, 2013:58).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Abdul Halim & Syam Kusufi, 2012:266). Harus disadari bahwa terdapat banyak pihak yang yang akan mengandalkan informasi laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, oleh karena itu informasi dalam laporan keuangan harus berkualitas (Mahmudi, 2010:9).

Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, memenuhi kebututuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya (Yosefrinaldi,2013). Laporan keuangan pemerintah yang buruk dapat menimbulkan implikasi negatif antara lain: (a) Menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana publik (pemerintah), (b) Investor akan takut menanamkan modalnya karena laporan keuangan tidak

dapat diprediksi yang berakibat meningkatnya resiko investasi, (c) Pemberi donor akan mengurangi atau menghentikan bantuannya, (d) Kualitas keputusan menjadi buruk, dan (e) Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan kinerja aktual (Mardiasmo,2002:174).

Laporan Keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, hal tersebut dilakukan agar informasi dalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat (Sukirman dkk,2013). Untuk mengetahui apakah laporan keuangan yang telah disusun pemda sudah wajar atau belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, tentunya diperlukan pihak ketiga yang independen untuk melakukan pemeriksaan (Silviana, 2012).

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pemeriksa yang independen akan melaksanakan pemeriksaan sesusi dengan standar yang berlaku dan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan (Dadang Suwanda, 2013:118). Menurut penjelasan Undang-undang No.15 Tahun 2004 terdapat empat jenis opini yang diberikan oleh BPK, yaitu opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP / *Unqualified Opinion),* opini Wajar Dengan Pengecualian, (WDP / *Qualified Opinion),* opini Tidak Wajar (TW / *Adversed Opinion),* dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP / *Disclaimer)*.

Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian merupakan pendapat yang paling baik dan diharapkan laporan keuangan daerah memperoleh predikat tersebut, apabila laporan keuangan pemerintah daerah telah memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian maka para pengguna laporan tidak perlu ragu-ragu lagi untuk menjadikan laporan tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan (Mahmudi,2010:39). Namun, apabila auditor menyatakan tidak wajar atau bahkan tidak memberikan pendapat (*disclaimer)*, maka pembaca laporan perlu berhati-hati menggunakan laporan keuangan tersebut, karena laporan keuangan itu berpeluang menyesatkan pembaca dan pengguna laporan keuangan (Mahmudi,2010:39).

Sejumlah persoalan membelit daerah Jawa Barat dalam upaya meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), data Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat tahun 2007-2012 menunjukan pertambahan daerah yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian masih terbilang lambat (Cornell Syarif Prawiradiningrat, 2013). Dari 27 Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Jabar yang menjadi entitas pemeriksaan BPK, baru sebanyak enam entitas mendapat opini WTP, sembilan belas entitas endapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan dua entitas mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat atau *disclaimer*, enam entitas yang mendapat opini WTP oleh BPK yaitu Provinsi Jabar, Kota Banjar, Kota Depok, Kota Cimahi, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Majalengka (Agung Firman Sampurna,2014). Rendahnya kualitas laporan keuangan, secara umum disebabkan penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi standar akuntansi pemerintah (SAP), penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang belum memadai dan kurang ditaatinya ketentuan perundangan (Tahria Syafrudin,2012).

Fenomena yang terjadi, Laporan keuangan pemerintah daerah kota Bandung tahun anggaran 2013 diganjar Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan-Republik Indonesia (BPK-RI) terkendala pencatatan aset yang masih banyak belum dilengkapi dokumen sehingga tidak bisa meraih opini tertinggi yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (Ridwan Kamil,2014). Fenomena lainnya terkait dengan Belanja, dimana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan Belanja di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih ada yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban, pertanggungjawabannya tidak lengkap dan tidak dapat diyakini kebenarannya (Agung Firman Sampurna,2014).

Mardiasmo (2013) menyatakan bahwa peran internal audit menjadi sangat penting dalam menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena berperan dalam kehandalan Sistem Pengendalian Intern, ketaatan peraturan dan kesesuaian dengan Sistem Administrasi Pemerintahan. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (LKPD) baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota dapat ditingkatkan oleh peran Internal Audit (Imam Bastari, 2013). Internal audit membantu pihak manajemen dalam mengidentifikasi kelemahan-kelemahan, inefisiensi dan kegagalan (*ineffectiveness)* dari berbagai program yang telah dicanangkan oleh organisasi/ pemerintah (Ihyaul Ulum, 2009 : 131).

Menurut Undang-Undang No.15 Tahun 2004, Pemeriksaan Intern (audit internal) pada pemerintah daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementrian dan Lembaga, Inspektorat Provinsi dan atau Kabupaten/Kota. Fenomena yang ada menyebutkan jumlah auditor internal pemerintah saat ini dinilai tidak mencukupi kebutuhan, menyebabkan pelaksanaan internal audit pada pemerintah daerah kurang berjalan dengan baik (Eko Prasojo,2012). Untuk mewujudkan peran yang efektif, maka peran Internal Audit oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) harus juga mengacu pada praktek-praktek modern yang berorientasi kepada pencapaian tujuan organisasi, melalui kegiatan: (1) Pemberian kepastian, keyakinan dan penjaminan yang memadai (*assurance*) dengan melakukan kegiatan audit, *review*, penilaian, evaluasi, verifikasi, pengujian dan pemantauan (2) Memberikan solusi atas berbagai macam permasalahan dan pencapaian tujuan organisasi, dengan kegiatan sosialisasi, bimbingan, pendampingan, pemberian saran/ petunjuk, konsultasi dan pelatihan – pelatihan (Susetya, 2011).

Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang- Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Kepala Daerah berkewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan menyampaikan perkembangan tindak lanjut paling lambat 60 hari sejak LHP diterima (Agung Firman Sampurna,2014). Fenomena lainnya dalam masalah pelaksanaan audit internal yaitu, fungsi audit internal di kota Bandung harus memantau kembali pelaksanaan pemerintah daerah menyikapi rekomedasi yang cukup banyak perlu ditindaklanjuti (Tedi Rusmawan,2013).

Untuk memperkuat proses akuntabilitas publik, salah satu aspek yang harus dilakukan adalah adanya audit sektor publik yang handal dan terpercaya (Mahmudi,2010:37). Audit harus dilakukan oleh auditor yang memilki kompetensi, profesionalisme dan independensi agar laporan audit yang dihasilkan handal dan dapat dipercaya (Mahmudi,2010:37). Dalam menjalankan tugasnya seorang audit sektor publik tentunya harus memenuhi persyaratan kemampuan atau keahlian sebagai seorang auditor (Indra Bastian,2014:26).

Orang yang melaksanakan audit harus memiliki kompetensi artinya memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberian jasa profesional yang kompeten kepada klien atau pemberi kerja (Ikatan Akuntan Publik Indonesia,2011:11). Pemeriksa yang ditugasi untuk melaksanakan pemeriksaan menurut standar pemeriksaan harus secara kolektif memiliki pengetahuan tentang standar pemeriksaan yang dapat diterapkan terhadap jenis pemeriksaan yang ditugaskan serta memiliki latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam pemeriksaan yang dilaksanakan (Indra Bastian,2014:27).

Fenomena yang ada menyebutkan bahwa auditor internal pemerintah pada APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) daerah belum kompeten, hampir di seluruh pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di Jawa Barat masih sangat minim sumber daya manusia yang memiliki latar belakang akuntansi atau auditor (Tahria Syarifudin, 2012). Fenomena lainnya menyebutkan bahwa auditor internal pemerintah saat ini masih dalam keterbatasan kualitas, banyak auditor internal pemerintah belum mempunyai pengalaman yang cukup untuk bisa mendeteksi potensi korupsi anggaran pemerintah (Sidik Wiyoto, 2012).

Berdasarkan konsep pemikiran yang dituangkan dalam latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi auditor terhadap pelaksanaan audit internal dan seberapa besar pengaruh pelaksanaan audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kota Bandung.

II. KAJIAN PUSTAKA,KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kompetensi Auditor

Menurut Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati (2010:2),kompetensi artinya Seorang auditor harus mempunyai kemampuan, ahli dan berpengalaman dalam memahami kriteria dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan

diambilnya. Menurut *Institute Of Internal Auditor* (IIA) dalam Randal J Elder et.al (2011:450),kompetensi artinya auditor mengaplikasikan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam melakukan jasa audit internal. Menurut peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. PER-211 /K /JF /2010 tentang Standar Kompetensi Auditor Pasal 1 Ayat 3, kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa Kompetensi Auditor adalah kemampuan, keahlian dan pengalaman yang harus dimiliki dan diaplikasikan oleh auditor dalam melaksanakan tugas jabatannya.

2.1.2 Pelaksanaan Audit Internal

Menurut Hiro Tugiman (2006:53),pelaksanaan pemeriksaan internal harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian dan pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan menindaklanjuti (*follow up).* Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:16), pelaksanaan audit internal adalah dalam melaksanakan audit, auditor internal harus mengidentifikasi informasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Audit Internal adalah tahapan yang dilaksanakan auditor untuk mencapai tujuan penugasan berupa aktivitas penjaminan kualitas (*assurance)* dan konsultasi guna menilai suatu kegiatan organisasi.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti (2011:44), kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, agar dapat meemenuhi kualitas yang dikehendaki laporan keuangan pemerintah harus memenuhi empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.Menurut Mahmudi (2010:11),laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah dinilai berkualitas apabila memenuhi ciri-ciri berikut: relevan, andal (*reliability*), dapat dibandingkan (*comparability)* dan dapat dipahami (*understandability)*. Menurut Syofyan Syafri Harahap (2009:146),kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa, kualitas laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran yang digunakan agar informasi yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi penggunanya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain yaitu para pemangku kepentingan (*stakeholder*), tentang kondisi keuangan pemerintah. Jika laporan keuangan yang dipublikasikan buruk maka pengguna laporan keuangan memperoleh informasi yang salah dan menyesatkan yang berakibat kesalahan dalam pembuatan keputusan, maka pemerintah dituntut untuk terus memperbaiki kualitas laporan keuangan yang dipublikasikannya (Mahmudi, 2010:10).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 57, Inspektorat Provinsi / Kabupaten / Kota melakukan *review* atas laporan keuangan pemerintah daerah sebelum disampaikan Gubernur / Bupati / Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.41/PMK.09/2010, dalam membantu menteri/pimpinan lembaga untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka dilaksanakan proses *Review* yaitu penelaahan atas penyelenggaraan penyajian laporan keuangan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP). Pengauditan terhadap lembaga sektor publik harus dilakukan oleh auditor yang telah memiliki pengalaman mengaudit dan mengikuti pelatihan yang cukup, serta memiliki latar belakang pendidikan akuntansi (Mahmudi, 2010:37).

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2014:96),hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba menyatakan hipotesis penelitian sebagai berikut:

a. Kompetensi Auditor berpengaruh terhadap Pelaksanaan Audit Internal.
b. Pelaksanaan Audit Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:13), objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, *valid*, dan *reliable* tentang suatu hal (variabel tertentu). Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Kompetensi Auditor, Pelaksanaan Audit Internal dan Kualitas Laporan Keuangan.

3.2 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:3),metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujan dan kegunaan tertentu. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui pengaruh yang signifikan dari variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti. Metode penelitian ini menggunakan analisis metode deskriptif dan verifikatif.

Menurut Juliansyah Noor (2012:111), metode deskriftif adalah sebagai berikut penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah aktual dan peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Menurut Juliansyah Noor (2012:20) metode verifikatif adalah sebagai berikut,verifikatif penelitian dilaksanakan untuk menguji kebenaran dari sesuatu (ilmu pengetahuan) yang telah ada data penelitian yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya kerugian terhadap informasi atau ilmu pengetahuan tertentu.

Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu rumusan masalah. Data yang dibutuhkan merupakan data yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, data tersebut dikumpulkan dan dianalisis berdasarkan teori-teori yang untuk kemudian ditarik kesimpulan.Sementara itu metode Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan alat uji statistik, yaitu analisis jalur (*path analysis).* Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel Kompetensi Auditor (X) terhadap Pelaksanaan Audit Internal (Y) dan implikasinya terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Z).

3.2.1 Operasionalisasi Variabel

Menurut Nur Indriantoro dalam Umi Narimawati (2010:31),operasionalisasi variabel adalah penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu dapat digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalisasikan *construct,* sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik.

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian mengenai Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Pelaksanaan Audit Internal dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Variabel itu sendiri dalam konteks penelitian menurut Sugiyono (2014:61) adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertent yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel-variabel yang diukur dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Variabel bebas (*Independence variable)*
   Menurut Sugiyono (2014:61),variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah Kompetensi Auditor.

Pengumpulan informasi mengenai variabel ini berdasarkan kuesioner berupa daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden.

2. Variabel *Intervening*
   Menurut Sugiyono (2014:63),variabel *intervening* merupakan variabel penyela/antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen.Variabel *intervening* (Y) dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Audit Internal. Pengumpulan informasi mengenai variabel ini berdasarkan kuesioner berupa daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden.
3. Variabel terikat (*dependent variable)*
   Menurut Sugiyono (2014:61),variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.Variabel terikat (Z) yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan. Pengumpulan informasi mengenai variabel ini berdasarkan kuesioner, berupa daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden.

3.2.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu studi kepustakaan *(Library Reseach)* dan Penelitian Lapangan (*Field Research*). Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan*(Library Reseach)*
   Penelitian ini dilakukan untuk pengambilan data yang bersifat teori yang kemudian digunakan sebagai literatur penunjang guna mendukung penelitian yang dilakukan. Data ini diperoleh dari buku-buku sumber yang dapat dijadikan acuan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
   Dalam penulisan laporan ini, penulis mengambil data secara langsung pada objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:
   a. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan langsung melalui tanya jawab antara penulis dengan petugas yang berwenang yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.Menurut Juliansyah Noor (2012:138),wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.
   b. Observasi, yaitu cara pengambilan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap masalah yang sedang diteliti, dengan maksud untuk membandingkan keterangan-keterangan yang diperoleh dengan kenyataan. Menurut Juliansyah Noor (2012:140),teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.
   c. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan menyebar daftar pertanyaan untuk diisi oleh sejumlah responden. Untuk mendapatkan data yang diperoleh bagi pencapaian sasaran penelitian ini maka digunakan pengukuran melalui sejumlah kuesioner. Menurut Juliansyah Noor (2012:139),kuisioner/angket merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.

3.2.3 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2014:117),populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa populasi merupakan obyek atau subyek yang berada pada suatu wilayah yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini populasi yang dimaksud adalah tim audit pemerintah kota Bandung yang berjumlah 21 orang terdiri dari 4 Inspektur pembantu dan 17 pejabat fungsional auditor Inspektorat Pemerintah Kota Bandung pada IRBAN Wilayah I,II,III & IV.

Menurut Sugiyono (2014:118),sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.Karena jumlah populasi relatif kecil yaitu kurang dari 30 orang

maka semua anggota populasi dijadikan sampel, teknik ini disebut sampel jenuh atau sensus.Menurut Sugiyono (2014:124),sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

3.2.4 Metode Analisis

Dalam menganalisis penelitian ini penulis mellakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Uji MSI (Data ordinal ke interval)
   Menurut Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat (2011:55) *Method of Successive Interval* (MSI)*,* yaitu metode penskalaan untuk menaikkan skala pengukuran ordinal ke skala pengukuran interval.Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa *Method of Successive Interval* (MSI) merupakan alat untuk mengubah data ordinal menjadi interval. Adapun di dalam proses pengolahan data MSI tersebut, peneliti menggunakan bantuan *AdditionalInstrument* (*Add-Ins*) dari Microsoft Excel 2010.
2. Analisis Deskriptif
   Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan jenis atau alat bentuk penelitian deskriptif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. Penelitian Deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan apa yang dilakukan oleh berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk selanjutnya diolah menjadi data. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana masing masing variabel penelitian. Metode kualitatif yaitu metode pengolahan data yang menjelaskan pengaruh dan hubungan yang dinyatakan dengan kalimat. Analisis kualitatif digunakan untuk melihat faktor penyebab.
3. Analisis Verifikatif
   Analisis yang digunakan untuk mebuktikan hipotesis pada penelitian ini adalah *Path Analysis.* Menurut Juliansyah Noor (2012:265), analisis jalur (*Path Analysis)* adalah keterkaitan hubungan/pengaruh antara variabel bebas, variabel *intervening* dan variabel terikat di mana peneliti mendefinisikan secara jelas bahwa suatu variabel akan menjadi penyebab variabel lainnya yang biasanya disajikan dalam bentuk diagram.Analisis jalur mengkaji hubungan sebab akibat yang bersifat struktural dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan keterkaitan antar variabel independen.
   Adapun langkah-langkah menguji *path analysis* adalah sebagai berikut:
   a. Merumuskan hipotesis dan persamaan struktural
      Sesuai dengan kerangka pemikiran maka dapat membuat dua persamaan struktural yaitu persamaan regresi yang menunjukkan hubungan yang dihipotesiskan.
   b. Menghitung koefisien jalur yang didasarkan pada koefisien regresi
      Menggambar diagram jalur lengkap, menentukan sub-sub strukturnya dan merumuskan persamaan strukturnya sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Menghitung koefisien regresi untuk struktur yang telah dirumuskan.
      Pada dasarnya koefisien jalur (*path*) adalah koefisien regresi yang distandarkan yaitu koefisien regresi yang dihitung dari basis data yang telah diset dalam angka baku atau Z-*score* (data yang diset dengan nilai rata-rata = 0 dan standar deviasi = 1). Koefisien jalur yang distandarkan (*standardized path coefficient*) ini digunakan untuk menjelaskan besarnya pengaruh (bukan memprediksi) variabel bebas terhadap variabel lain yang diberlakukan sebagai variabel terikat.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Pengujian Alat Analisis

1. Hasil Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2014:363), validitas merupakan derajad ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Berdasarkan definisi tersebut, maka validitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat test (kuesioner) dalam mengukur secara benar apa yang diinginkan peneliti untuk diukur. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data

yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Apabila koefisien korelasi butir pernyataan dengan skor total item lainnya > 0,30 maka pernyataan tersebut dinyatakan valid (Barker *et al*, 2002:70).

Berdasarkan hasil pengolahan didapat nilai koefisien korelasi setiap butir pernyataan dengan total item lainnya lebih besar dari nilai 0,30, hasil uji ini mengindikasikan bahwa semua butir pertanyaan yang diajukan pada ketiga variabel valid dan layak digunakan sebagai alat ukur untuk penelitian dan dapat diikutsertakan pada analisis selanjutnya.

2. Hasil Uji Reliabilitas

Menurut Juliansyah Noor (2012 : 131), reabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Dari definisi di tersebut dapat dikatakan bahwa pengukuran yang memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi yaitu pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya. Reliabilitas merupakan salah satu ciri atau karakter utama instrument pengukuran yang baik. Setelah melakukan pengujian validitas butir pernyataan maka langkah menguji keandalan atau kepercayaan alat pengungkapan dari data.

Untuk melihat andal tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui koefisien reliabilitas. Apabila koefisien reliabilitas lebih besar dari 0.70 maka secara keseluruhan pernyataan dinyatakan andal (Barker *et al*, 2002:70). Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan metode *split-half* diperoleh nilai reliabilitas kuesioner (*Spearman-Brown Coefficient*) lebih besar dari nilai kritis 0,70. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan yang digunakan sudah reliabel sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan untuk mengukur ketiga variable sudah memberikan hasil yang konsisten.

4.1.2 Analisis Deskriptif

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan *IBM SPSS Statistics software Version 20.0*, maka hasil analisis verifikatif dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Kompetensi Auditor

Kompetensi auditor menggambarkan kemampuan, ahli dan pengalaman dalam memahami kriteria dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya. Kompetensi Auditor diukur dengan 3 indikator yaitu Ahli, Pelatihan dan Pengalaman.Untuk menilai masing-masing indikator penulis mengunakan nilai persentase skor ideal dengan skor total. Dari data penelitian diperoleh skor penilaian resonden untuk tiga indikator kompetensi auditor dalam penelitian ini seperti terlihat pada tabel 1.

persentase total skor tanggapan responden pada variabel Kompetensi Auditor sebesar 58,41% berada di antara interval 52.01% – 68.00%. Kompetensi auditor secara umum masuk dalam kategori cukup. Indikator dari kompetensi auditor terlihat yang masih kurang baik yaitu pada indikator pengalaman. Keahlian audior secara umum cukup dan pelatihan yang diterima sudah baik.

2. Pelaksanaan Audit Internal

Pelaksanaan Audit Internal atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. l Pelaksanaan Audit Internal diukur dengan 4 indikator yaitu Perencanaan pemeriksaan, Pengujian & Pengevaluasian, Penyampaian Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan. Untuk menilai masing-masing indikator penulis mengunakan nilai persentase skor ideal dengan skor total. Dari data penelitian diperoleh skor penilaian resonden untuk empat indikator pelaksanaan audit internal dalam penelitian ini seperti terlihat pada tabel 2.

Persentase total skor tanggapan responden pada Pelaksanaan Audit Internal sebesar 65,6% berada di antara interval 52,01% – 68.00%. Penilaian untuk Pelaksanaan Audit Internal masuk dalam kategori cukup. Artinya pelaksanaan Audit Internal pada pemerintah kota Bandung yang dilaksanakan oleh inspektorat masih perlu ditingkatkan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Dimana harus meningkatkan tindak lanjut pemeriksaan dan harus melaksanakan perencanaan pemeriksaan yang lebih baik.

Sementara untuk pengujian dan pengevaluasian serta penyampaian hasil pemeriksaan dinilai sudah cukup baik.

3. Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas Laporan Keuangan diukur dengan 4 indikator yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Untuk menilai masing-masing indikator penulis mengunakan nilai persentase skor ideal dengan skor total. Dari data penelitian diperoleh skor penilaian resonden untuk empat indikator Kualitas Laporan Keuangan dalam penelitian ini seperti terlihat pada tabel 3.

Persentase total skor tanggapan responden pada variabel Kualitas Laporan Keuangan sebesar 65,8% berada di antara interval 52.01% – 68.00%. Penilaian untuk Kualitas Laporan Keuangan masuk dalam kategori cukup. Terlihat untuk Laporan Keuangan sudah dapat dibandingkan dan Laporan Keuangan dapat dipahami dengan baik, keandalan Laporan Keuangan sudah cukup baik namun dalam indikator relevan dinilai masih kurang.

4.1.3 Analisis Verifikatif

4.1.3.1 Uji Normalitas Data

Berdasarkan *Kolmogorov-Smirnov Test* (D), untuk data variabel X (Kompetensi Auditor) diperoleh nilai D_{hitung} sebesar 0,148 dengan signifikansi uji adalah 0,678. Diperoleh nilai signifikansi uji lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan data variabel X (Kompetensi Auditor) berdistribusi normal. Untuk data variabel Y (Pelaksanaan Audit Internal) diperoleh nilai D_{hitung} sebesar 0,150 dengan signifikansi uji adalah 0,731. Diperoleh nilai signifikansi uji lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan data variabel Y (Pelaksanaan Audit Internal) berdistribusi normal. Untuk data variabel Z (Kualitas Laporan Keuangan) diperoleh nilai D_{hitung} sebesar 0,111 dengan signifikansi uji adalah 0,957. Diperoleh nilai signifikansi uji lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan data variabel Z (Kualitas Laporan Keuangan) berdistribusi normal.

Hasil uji normalitas data penelitian yang dilakukan memberikan kesimpulan data berdistribusi normal. Dengan demikian data dapat digunakan untuk menghitung analisis jalur karena telah memenuhi persyaratan asumsi normalitas data yang dapat digunakan dalam analisis jalur.

4.1.3.2 Koefisien korelasi

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 20 didapat koefisien korelasi variabel X(Kompetensi Auditor), Y (Pelaksanaan Audit Internal), Z (Kualitas Laporan Keuangan) diperoleh dari hasil perhitungan Koefisien korelasi antara Kompetensi Auditor dengan Pelaksanaan Audit Internal adalah sebesar 0,730. Jika diinterpretasikan korelasi Kompetensi Auditor dengan Pelaksanaan Audit Internal masuk kategori cukup tinggi karena berkisar antara 0,61 – 0,80 dan arahnya positif. Ini berarti terdapat hubungan yang sangat kuat antara Kompetensi Auditor dengan Pelaksanaan Audit Internal dimana apabila Kompetensi Auditor meningkat maka Pelaksanaan Audit Internal akan semakin tinggi.

Koefisien korelasi antara Pelaksanaan Audit Internal dengan Kualitas Laporan Keuangan adalah sebesar 0,851. Jika diinterpretasikan keeratan hubungan Pelaksanaan Audit Internal dengan Kualitas Laporan Keuangan masuk dalam kategori korelasi tinggi karena berkisar antara 0,80 – 1 dan arahnya positif. Ini berarti terdapat hubungan yang sangat kuat antara Pelaksanaan Audit Internal dengan Kualitas Laporan Keuangan dimana apabila Pelaksanaan Audit Internal meningkat maka Kualitas Laporan Keuangan akan semakin tinggi.

4.1.3.3 Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Pelaksanaan Audit Internal

Model analisis jalur dalam penelitian ini terdiri atas 2 sub struktur. Pada sub struktur yang pertama variabel independen adalah Kompetensi Auditor dan sebagai variabel dependen. Langkah-langkah perhitungan yang dilakukan untuk menguji pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Pelaksanaan Audit Internal adalah sebagai berikut:

1) Menghitung Koefisien Jalur

Model struktural yang diteliti terdiri atas hanya satu variabel independen yaitu variabel Kompetensi Auditor, maka nilai koefisien jalur sama dengan koefisien korelasi.Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan *software IBM SPSS Statistics Version 20.0* diperoleh koefisien jalur kompetensi auditor terhadap pelaksanaan audit internal yang diperoleh (ρ_{yx}) sebesar 0,730 Nilai

ini merupakan bobot pengaruh langsung variabel Kompetensi Auditor terhadap Pelaksanaan Audit Internal pada Pemerintah Daerah Kota Bandung.

2) Menghitung Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi Kompetensi Auditor terhadap Pelaksanaan Audit Internal dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$R^2 = \rho_{yx}^2 = 0{,}730^2 = 0{,}533$

Selain pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Pelaksanaan Audit Internal, terdapat pengaruh variabel lain (residu). Besar koefisien jalur untuk faktor lain diperoleh melaui perhitungan sebagai berikut :

$$\rho_{y\varepsilon 1} = \sqrt{1 - R_{yx}^2}$$

$$\rho_{y\varepsilon 1} = \sqrt{1 - 0{,}533} = 0{,}683$$

Jadi dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa Kompetensi Auditor memberikan pengaruh sebesar 53,3% terhadap Pelaksanaan Audit Internal pada Pemerintah Daerah Kota Bandung. Hal ini berarti jika Kompetensi Auditor lebih baik maka dalam pelaksanaannya akan meningkatkan Pelaksanaan Audit Internal. Dan sisanya sebesar 46,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar Kompetensi Auditor.

Diperoleh persamaan struktural untuk model pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Pelaksanaan Audit Internal :

$Y = \rho_{yx} X + \rho_{y\varepsilon 1}$

$Y = 0{,}730X + 0{,}683$

4.1.3.4 Pengaruh Pelaksanaan Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pada sub struktur yang kedua variabel independen (eksogenus variabel) adalah Pelaksanaan Audit Internal dan sebagai variabel dependen (endogenus variabel) adalah Kualitas Laporan Keuangan. Untuk menguji pengaruh Pelaksanaan Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan langkah-langkah perhitungan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Menghitung Koefisien Jalur

Model struktural yang diteliti terdiri atas satu variabel independen yaitu variabel Pelaksanaan Audit Internal, maka nilai koefisien korelasi sekaligus menjadi koefisien jalur. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan *software IBM SPSS Statistics Version 20.0* diperoleh koefisien jalur Pelaksanaan Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan diperoleh (ρ_{zy}) sebesar 0,851. Nilai ini merupakan bobot pengaruh langsung variabel Pelaksanaan Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung.

2) Menghitung Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi diperoleh dari mangkuadratkan nilai koefisien jalur, jadi koefisien determinasi Pelaksanaan Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$R^2 = \rho_{zy}^2 = 0{,}851^2 = 0{,}724$

Selain pengaruh Pelaksanaan Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan, terdapat pengaruh variabel lain (residu). Besar koefisien jalur untuk faktor lain yang tidak masuk dalam spesifikasi adalah :

$$\rho_{z\varepsilon 2} = \sqrt{1 - R_{zy}^2}$$

$$\rho_{z\varepsilon 2} = \sqrt{1 - 0{,}724} = 0{,}525$$

Jadi dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa Pelaksanaan Audit Internal memberikan pengaruh sebesar 72,4% terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung. Hal ini berarti jika penilaian terhadap Pelaksanaan Audit Internal lebih baik maka dalam pelaksanaannya akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. Dan sisanya sebesar 27,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar Pelaksanaan Audit Internal.

Diperoleh persamaan struktural untuk model pengaruh Pelaksanaan Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebagai berikut :

$Z = \rho_{zy} Y + \rho_{z\varepsilon 2}$

$Z = 0{,}851Y + 0{,}525$

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Pelaksanaan Audit Internal

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil dari nilai korelasi kompetensi auditor dengan pelaksanaan audit internal adalah sebesar 0,730. Nilai korelasi bertanda positif, yang menunjukkan bahwa yang terjadi antara variabel kompetensi auditor dengan variabel pelaksanaan audit internal adalah searah. Dimana semakin tinggi kompetensi auditor, maka akan diikuti pula oleh semakin baiknya pelaksanaan audit internal. Tingkat keeratan korelasi 0,731 termasuk dalam kategori hubungan cukup tinggi karena berada pada interval 0.61 – 0, 80.

Hasil dari koefisien determinasi, kompetensi auditor berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan audit internal dengan besar pengaruh 53,3%. Hasil tersebut menunjukkan jika kompetensi auditor lebih baik maka dalam pelaksanaannya akan meningkatkan pelaksanaan audit internal. Kompetensi auditor dikatakan baik dan mendukung pelaksanaan audit internal apabila auditor telah memenuhi kriteria sebagai auditor yang kompeten. Sedangkan sisanya sebesar 46,7% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti namun diyakini turut mempengaruhi pelaksanaan audit internal, seperti profesionalisme auditor, independensi auditor dan sebagainya

Menurut Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati (2010 : 41) auditor harus memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang memadai, yaitu ahli, pelatihan dan pengalaman. Fenomena yang ada menyebutkan bahwa auditor internal pemerintah daerah pada APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) belum kompeten, hampir di seluruh pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di Jawa Barat masih sangat minim sumber daya manusia yang memiliki latar belakang akuntansi atau auditor (Tahria Syarifudin, 2012). Hal ini sejalan dengan tanggapan responden dimana 52% responden tidak memiliki latar belakang pendidikan formal pada bidang akuntansi sehingga sulit dalam memahami dan melaksanakan pemeriksaan sesuai standar yang berlaku. Nilai yang diperoleh untuk indikator ahli masuk kategori cukup baik Hasil yang diperoleh mengandung pengertian bahwa dilihat dari keahlian auditor masih belum ideal dan perlu ditingkatkan agar kompetensi mereka dapat lebih meningkat.

Fenomena lainnya menyebutkan bahwa auditor internal pemerintah saat ini masih dalam keterbatasan kualitas, banyak auditor internal pemerintah belum mempunyai pengalaman yang cukup untuk bisa mendeteksi potensi korupsi anggaran pemerintah (Sidik Wiyoto, 2012). Hal ini sejalan dengan tanggapan responden dimana responden yang menduduki posisi jabatan saat ini kurang dari 3 tahun memperlihatkan masih belum cukup banyak melaksanakan pemeriksaan sehingga sulit menemukan kesalahan dalam laporan keuangan unit yang diperiksa. Nilai yang diperoleh indikator pengalaman masuk kategori kurang baik. Hasil yang diperoleh mengandung pengertian bahwa masih kurangnya pengalaman auditor yang menjadikan kompetensi belum optimal. Hasil yang diperoleh mengandung pengertian bahwa masih kurangnya pengalaman auditor yang menjadikan kompetensi belum optimal.

Hasil penelitian ini didukung oleh pendapat Wati Aris Astuti (2010) dalam penelitiannya yang menjelaskan pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Pelaksanaan audit internal mempunyai pengaruh sebesar 30,6% yang berarti kompetensi berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan audit internal. Hiro Tugiman (2001:27) menjelaskan bahwa Pemeriksaan internal harus dilaksanakan secara ahli dan dengan ketelitian profesional, pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas. Artinya untuk menghasilkan pelaksanaan audit internal yang baik maka harus didukung oleh kompetensi auditor yang baik pula.

Diharapkan auditor pada inspektorat pemerintah kota Bandung senantiasa untuk menambah jenjang pendidikan, mengasah pengalaman, dan mengikuti berbagai pelatihan agar kompetensinya lebih meningkat sehingga dapat lebih baik dalam melaksanakan audit internal.

4.2.2 Pengaruh Pelaksanaan audit internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil dari nilai korelasi pelaksanaan audit internal dengan kualitas laporan keuangan adalah sebesar 0,851. Nilai korelasi bertanda positif, yang menunjukkan bahwa yang terjadi antara variabel pelaksanaan audit internal dengan variabel kualitas laporan keuangan adalah searah. Dimana semakin tinggi pelaksanaan audit internal, maka akan diikuti pula oleh semakin baiknya kualitas laporan keuangan. Tingkat

keeratan korelasi 0,851 termasuk dalam kategori hubungan tinggi karena berada pada interval 0.81 – 1.

Hasil dari koefisien determinasi, pelaksanaan audit internal berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan dengan besar pengaruh 72,4%. Hasil tersebut menunjukkan jika pelaksanaan audit internal lebih baik maka dalam pelaksanaannya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sedangkan sisanya sebesar 27,6% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti namun diyakini turut mempengaruhi kualitas laporan keuangan, seperti sistem informasi akuntansi, pengawasan, kualitas aparatur pemerintah daerah dan lain sebagainya.

Menurut Hiro Tugiman (2001:18) Pelaksanaan audit internal yang baik diukur dengan 4 indikator yaitu Perencanaan pemeriksaan, Pengujian & Pengevaluasian, Penyampaian Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan. Pada indikator perencanaan pemeriksaan pemeriksa internal haruslah merencanakan setiap pemeriksaan yang dilakukan dalam proses pemeriksaan, salah satunya Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan.

Fenomena yang ada menyebutkan jumlah auditor internal pemerintah saat ini dinilai tidak mencukupi kebutuhan, menyebabkan pelaksanaan pelaksanaan audit internal pada pemerintah daerah kurang berjalan dengan baik (Eko Prasojo,2012). Hal ini sejalan dengan tanggapan responden yang menjawab jumlah tenaga auditor pada Inspektorat Kota Bandung tidak memadai dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pemeriksaan. Kekurangan jumlah auditor ini dapat menyebabkan lambatnya proses pelaksanaan pelaksanaan audit internal, karena tidak seimbangnya jumlah tenaga auditor yang ada dengan jumlah banyaknya pekerjaan.

Hiro Tugiman (2001:18) menyatakan audit internal harus terus meninjau atau melakukan follow up untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan lanjut yang tepat. Fenomena lainnya dalam masalah pelaksanaan audit internal yaitu, fungsi pelaksanaan audit internal di Kota Bandung harus memantau kembali pelaksanaan Pemerintah Daerah menyikapi rekomedasi yang cukup banyak perlu ditindaklanjuti (Tedi Rusmawan,2013). Hal ini sejalan dengan tanggapan responden yang menyatakan bahwa 61 – 80% rekomendasi belum ditindaklanjuti oleh unit yang diperiksa. Pada indikator tindak lanjut pemeriksaan nilai yang diperoleh masuk kategori kurang baik. Hasil yang diperoleh mengandung pengertian bahwa Tindak Lanjut Pemeriksaan pelaksanaan audit internal yang dilakukan masih belum dilakukan secara baik.

Menurut Mahmudi (2010:11) terdapat empat karakteristik prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu relevan,andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Fenomena yang terjadi, Laporan keuangan pemerintah daerah kota Bandung tahun anggaran 2013 diganjar Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan-Republik Indonesia (BPK-RI) terkendala pencatatan aset yang masih banyak belum dilengkapi dokumen sehingga tidak bisa meraih opini tertinggi yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (Ridwan Kamil,2014). Hal ini sejalan dengan tanggapan responden yang menyatakan 61 – 80% pencatatan laporan keuangan pada unit tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah belum dilengkapi dokumen.Untuk indikator relevan nilai yang diperoleh masuk kategori kurang. Hasil yang diperoleh mengandung pengertian kualitas laporan keuangan belum relevan, sehingga kelengkapan pencatatan pada unit yang di periksa masih perlu ditingkatkan.

Fenomena lainnya terkait dengan Belanja, dimana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan Belanja di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih ada yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban, pertanggungjawabannya tidak lengkap dan tidak dapat diyakini kebenarannya (Agung Firman Sampurna,2014). Hal ini sejalan dengan tanggapan responden menjawab Sebagian besar pencatatan tidak sesuai dengan jumlah fisik dan bukti data pada laporan keuangan unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diperiksa 61 – 80% tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Hasil yang diperoleh untuk kategori andal masuk kategori kurang baik. Hal ini mengandung pengertian bahwa kualitas laporan keuangan yang dihasilkan belum andal dan perlu ditingkatkan dalam hal kesesuaian pencatatan dengan jumlah fisik pada laporan keuangan unit yang di periksa, dan kelengkapan bukti data laporan keuangan unit yang di periksa.

Hasil penelitian ini didukung oleh pendapat Safrida, Nadirsyah & Usman Bakar (2010) yang menyatakan bahwa peran pelaksanaan audit internal mempengaruhi kualitas laporan keuangan sebesar 12,1%. Dadang Suwanda (2013:190) menjelaskan aktivitas audit internal berupa penjaminan kualitas (*quality assurance)* adalah *review* laporan keuangan, *review* dilakukan berupa pengujian untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang akan diberikan asersi/pendapat oleh manajemen sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Peran pelaksanaan audit internal dalam memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan cukup penting dalam penyelengaraa pelaksanaan audit internal maka pembuatan laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah akan lebih berkualitas.

Untuk menyeimbangkan hal tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat menambah jumlah kekurangan auditor pada Inspektorat pemerintah kota Bandung dan lebih disiplin dalam meningkatkan proses pemantauan pelaksanaan pemerintah daerah sehingga pelaksanaan audit internal dapat lebih baik yang membuat kualitas laporan keuangan lebih berkualitas.

V. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Pelaksanaan Audit Internal dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, maka dalam bab ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompetensi auditor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan Audit Internal. Pengaruhnya cukup besar dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti namun diyakini turut mempengaruhi pelaksanaan Audit Internal, seperti profesionalisme auditor, independensi auditor dan sebagainya. Selain itu, kompetensi auditor juga memiliki hubungan positif terhadap pelaksanaan Audit Internal, artinya semakin besar kompetensi auditor maka pelaksanaan Audit Internal akan semakin besar pula. Namun kompetensi auditor pada Inspektorat pemerintah kota Bandung belum optimal, terlihat dari minimnya auditor yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau auditor serta minimnya pengalaman auditor dalam melaksanakan audit.
2. Pelaksanaan Audit Internal pada pemerintah kota Bandung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pengaruhnya cukup besar dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti namun diyakini turut mempengaruhi kualitas laporan keuangan, seperti sistem informasi akuntansi, pengawasan, kualitas aparatur pemerintah daerah dan lain sebagainya. Selain itu, pelaksanaan Audit Internal juga memiliki hubungan positif terhadap kualitas laporan keuangan, artinya semakin besar pelaksanaan Audit Internal maka kualitas laporan keuangan akan semakin besar pula. Namun pelaksanaan Audit Internal di pemerintah kota Bandung belum optimal, terlihat dari minimnya jumlah auditor pada Inspektorat pemerintah kota Bandung dan perlunya pemantauan kembali pelaksanaan pemerintah daerah menyikapi rekomendasi hasil pemeriksaan laporan keuangan yang cukup banyak perlu untuk ditindaklanjuti.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran, antara lain:

1. Diharapkan auditor pada inspektorat pemerintah kota Bandung senantiasa untuk menambah jenjang pendidikan, mengasah pengalaman, dan mengikuti berbagai pelatihan agar kompetensinya lebih meningkat sehingga dapat lebih baik dalam melaksanakan Audit Internal.
2. Diharapkan pemerintah daerah dapat menambah jumlah kekurangan auditor pada Inspektorat pemerintah kota Bandung dan lebih disiplin dalam meningkatkan proses pemantauan pelaksanaan pemerintah daerah sehingga pelaksanaan Audit Internal dapat lebih baik yang membuat kualitas laporan keuangan lebih berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim & Syam Kusufi.(2012). *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi.* Jakarta:Salemba Empat.

Agung Firman Sampurna . (2014). *BPK RI Perwakilan Propinsi Jawa Barat » Pemprov Jawa Barat Berhasil Pertahankan WTP.* Diakses pada 22 Juni, 2014 dari *World Wide Web:* http://bandung.bpk.go.id/?p=6664.

Amin Widjaja Tunggal. (2012).*Seluk Beluk Internal Auditing.* Jakarta: Harvarindo.

Ambrose Kiptoo Chelimo&Bilhah Muthoni Kariuki. (2013). An Evaluation of Internal Audit Function in Financial Reporting in Local Authorities in Kenya: A Case of Municipal Council of Eldoret.*Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences (JETEMS) 4(1): 114-119 © Scholarlink Research Institute Journals, 2013* (ISSN: 2141-7024)

Badan PemeriksaKeuangan. (2013). *IkhtisarHasilPemeriksaan Semester 2 Tahun 2013 Buku 1-5.*Didownloaddari: http://bpk.go.id

Barker, C. Pistrang., & Elliot, R. (2002). *Research Methods in Clinical Psychology* (2nd ed.). Chichester: John Wiley & Sons.

Chusnul Chotimah Safitri, Havid Sularso &Yanuar E. Restianto. (2013). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dengan *reward* sebagai variabel pemoderasi (studi pada aparat pengawas internal pemerintah di inspektorat daerah kabupaten se eks karesidenan Banyumas).*Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers (SCA-3)* Vol 3, No 1 (2013). ISBN : 978-979-9204-67-7.

Cornell Syarif Prawiradiningrat. (2013). *BPK Dorong Pemda di Jabar Gesit Raih WTP.* Diakses pada 2 April, 2014 dari *World Wide Web:* http://bandung.bisnis.com/?rever=mo

Dadang Suwanda.(2013).*Strategi Mendapatkan Opini WDP Laporan Keuangan Pemda.* Jakarta:PPM.

Deddi Nordiawan & Ayuningtyas hertianti.(2011). *Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta:Salemba Empat.

Emmy Mutiarini. (2014). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah kota Bandung tahun 2013.

Eko Prasojo. (2012). *Jumlah auditor Masih Minim.* Diakses pada 02 Juli, 2014 dari *World Wide Web:* http://finansial.bisnis. com/read/20121122/9/106182/jumlah-auditor-masih-minim.

Hery. (2010). *Potret Profesi Audit Internal (Di Perusahaan Swasta& BUMN Terkemuka).* Bandung:Alfabeta.

Hiro Tugiman. (2001). *Standar Profesional Audit Internal.*Cetakan kelima. Yogyakarta:Kanisius.

Hiro Tugiman. (2006).P*andangan Baru Internal Auditing,* cetakan 9,Yogyakarta: Kanisius.

Ihyaul Ulum. (2009). *Audit Sektor Publik Suatu pengantar.*Jakarta:Sinar Grafika Offset.

Imam Bastari (2013). *Audit Internal Berperan Tingkatkan Kualitas LKPD.* Diakses pada 7 Maret, 2014 dari *World Wide Web:* http://www.ciputranews.com/ibu-kota-daerah/audit-internal-berperan-tingkatkan-kualitas-lkpd

Imam Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19,*Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Indra Bastian. (2014). *Audit Sektor Publik:Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintahan.* Edisi ke-3. Jakarta:Salemba Empat.

Ikatan Akuntan Publik Indonesia. (2011). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta:Salemba Empat.

Juliansyah Noor. (2012). *Metodologi Penelitian : Skripsi, thesis, disertasi & karya ilmiah .*Edisi Pertama Cetakan Kedua.Jakarta:Prenada media group

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal.(2004). Standar Profesi Audit Internal. Jakarta.

Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah:Panduan Bagi Eksekutif,DPRD dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keptusan Ekonomi,Sosial dan Politik.*Edisi ke-2.Yogyakarta:UPP STIM YKPN.

Mardiasmo.(2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan ke-4. Yogyakarta:Andi.

Mardiasmo. (2013).*Roadmap to WTP" sebagai Implementasi dari PP No.71 Tahun 2010*. Diakses pada 7 Maret, 2014 dari *World Wide Web:* http://kai.ugm.ac.id/roadmap-to-wtp-sebagai-implementasi-dari-pp-no-71-tahun-2010/

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. PER- 211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Keuangan No.41/PMK.09/2010

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Randal J Elder,Mark S Beasley, Alvin A Arens &Amir Abadi Jusuf. (2011). *Jasa Audit dan Assurance Pendekatan Terpadu (Adaptasi Indonesia*).Jakarta:Salemba Empat.

Ridwan Kamil. (2014). *Kembali Raih WDP, Bandung Kebut Penataan Aset.* Diakses pada 09 Juni, 2014 dari World Wide Web: http://www.inilahkoran.com/read/detail/2105152/kembali-raih-wdp-bandung-kebut-penataan-aset

Safrida Yuliani,Nadirsyah & Usman Bakar. (2010). Pengaruh Pemahaman Akuntansi,Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal telaah & Riset Akuntansi Vol 3 No 2 hlm 206-220*.ISSN 1693-3397.Universitas Syiah Kuala.

Sidik Wiyoto . (2012). *Auditor Intern Pemerintah Belum Berkualitas.* Diakses pada 4 April, 2014 dari *World Wide Web:*http://BeritaKawanua.com

Singgih Santoso.(2007).*Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.

Silviana. (2012). Pengaruh Komitmen Kepala Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat. *Seminar Nasional Akuntansi dan Bisnis.* ISSN:2252-3936. Universitas Widyatama.

Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati. (2010). *Auditing Konsep dasar dan pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik.* Yogyakarta:Graha Ilmu.

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. (2011). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D).* Bandung:Alfabeta.

Sukirman, Havid Sulars & Erly Setyowati Nugraheni. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan dengan pengendalian intern akuntansi sebagai variabel pemoderasi (studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten banyumas). *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers (SCA-3)* Vol 3, No 1 (2013) .**ISBN: 978-979-9204-67-7.**

Susetya. (2011). Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Yang Efektif. Diakses pada 11 April, 2014 dari *World Wide Web:* http://www.itjen.kemenkeu.go.id/page/detil.aspx?id=80

Syahri Alhusin. (2003). *Aplikasi Statistik Praktis dengan SPSS.10 for Windows*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Syofyan Syafri Harahap.(2009). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan.* Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Tahria Syfrudin. (2012). Akibat Lemahnya SDM di Jawa Barat; Pemda Jarang Raih WTP. Diakses pada 16 Maret, 2014 dari *World Wide Web:* http://www.ahmadheryawan.com/lintas-jabar/lintas-jawa-barat/pemuda-a-olahraga/2096-akibat-lemahnya-sdm-di-jawa-barat-pemda-jarang-raih-wtp

Tahria Syfrudin. (2012). *Laporan Keuangan Daerah Buruk.* Diakses pada 6 Maret, 2014 dari *World Wide Web:* http://bandung.bpk.go.id/?p=4439

Tedi Rusmawan. (2013).*Pemkot Bandung Sulit Dapat NilaiWTP*. Diakses pada 22 Juni, 2014 dari World Wide Web: http://nasional.inilah.com/read/detail/2010884/pemkot-bandung-sulit-dapat-nilai-wtp#.U6axJ5SSxe8

Umi Narimawati. (2007). *Riset Manajemen Sumber daya Manusia.* Jakarta:Restu Agung.

Umi Narimawati. (2010). *Metodologi Penelitian: Dasar Penyusunan Penelitian Ekonomi.* Jakarta:Genesis.

Umi Narimawati (2010). *Penulisan Karya Ilmiah.* Bekasi: Genesis.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Wati Aris Astuti. (2010). Pengaruh independensi dan kompetensi auditor internal terhadap kualitas pelaksanaan audit internal pada BUMN di Bandung.*Jurnal Ekono Insentif Kopwil 4, Volume 4 No. 2, Oktober 2010*. ISSN: 1907 - 0640, halaman 1 s.d 10

William F Messier Jr, Steven M Glover &Doglass F Prawitt. (2005). *Jasa Audit dan Assurance*. Jakarta:Salemba Empat.

Yosefrinaldi. (2013). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening sistem pengendalian intern pemerintah *(*studi empiris pada dinas pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Se-Sumatera Barat*).* Universitas Negeri Padang :skripsi.

LAMPIRAN

Tabel 1
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Variabel Kompetensi Auditor (X)

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Ahli	108	210	53,26%	Cukup
2	Pelatihan	155	210	76,38%	Baik
3	Pengalaman	105	210	45,29%	Kurang Baik
	Total	**368**	**630**	**58,41**%	**Cukup**

Sumber: Data primer yang telah diolah,2014

Tabel 2
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Variabel Pelaksanaan Audit Internal (Y)

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Perencanaan pemeriksaan	108	210	53,26%	Cukup
2	Pengujian & Pengevaluasian	164	210	70,45%	Baik
3	Penyampaian Hasil Pemeriksaan	155	210	76,38%	Baik
4	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	124	210	48,36%	Kurang Baik
	Total	**551**	**840**	**67,2%**	**Cukup**

Sumber: Data primer yang telah diolah,2014

Tabel 3
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Z)

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Relevan	106	210	51,26%	Kurang Baik
2	Andal	101	210	48,25%	Kurang Baik
3	Dapat Dibandingkan	173	210	83,30%	Baik
4	Dapat Dipahami	173	210	83,30%	Baik
	Total	**553**	**840**	**65,8%**	**Cukup**

Sumber: Data primer yang telah diolah,2014